

TRI HITA KARANA DAN PENERAPAN AWIG-AWIG PADA KINERJA KEUANGAN LPD DI BALI

Desak Putu Ratna Dewi¹, I Komang Kumara Wijaya²¹ Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja - Indonesia, ² Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Kabupaten Bangli - Indonesia**Kata Kunci:**

Tri hita karana, awig-awig, kinerja keuangan, LPD

Keywords:

Tri hita karana, awig-awig, financial performance, LPD

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian desa adat di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai *Tri Hita Karana* dan penerapan *awig-awig* terhadap kinerja keuangan LPD di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*, dengan Pamucuk LPD sebagai responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Tri Hita Karana* dan penerapan *awig-awig* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan nilai budaya lokal dan aturan adat dapat mendukung tata kelola yang lebih baik serta berkontribusi terhadap keberlanjutan dan peningkatan kinerja keuangan LPD.

ABSTRACT

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) plays a vital role in supporting the economy of traditional villages in Bali. This study examines the influence of Tri Hita Karana values and the implementation of awig-awig on the financial performance of LPDs in Bali Province. Using a quantitative approach, the study employed purposive sampling, with Pamucuk LPD serving as respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The findings reveal that both Tri Hita Karana values and awig-awig implementation positively affect LPD financial performance. These results suggest that strengthening local cultural values and customary regulations can support better governance and contribute to the sustainability and financial performance of LPDs.

1. Pendahuluan

Peran desa dalam pembangunan nasional sangat penting. Peran desa tidak hanya terbatas pada peran sosial, budaya, agama, namun juga peran ekonomi dan pelayanan umum (Fajar, 2022). Kusumaputra, (2017) menegaskan bahwa keberadaan desa hendaknya dapat berguna dalam mendorong pertumbuhan nasional seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam konteks ekonomi, peran lembaga keuangan tradisional yang kian bertumbuh menandakan geliat aktif ekonomi di desa khususnya dalam mendukung perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Lembaga keuangan tradisional yang ada di Provinsi Bali dikenal akan aspek nilai lokal dan adat dalam memberikan dorongan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Lembaga ini dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa atau selanjutnya disingkat LPD. Lembaga ini khusus melayani kepentingan masyarakat desa adat setempat yang beroperasi di Bali guna peningkatan kesejahteraan dan fasilitator kebutuhan masyarakat desa. Pada hakikatnya LPD dibentuk sebagai aksi strategis dalam meningkatkan sumber pendanaan terhadap anggota masyarakat dan sebagai kekuatan dalam menjaga adat dan budaya Bali (Agustini, 2019). Akar kemunculan LPD berasal dari seminar kredit desa yang terselenggara pada tahun 1984 silam di Kota Semarang dan menyimpulkan bahwa kehadiran lembaga perkreditan pedesaan penting untuk menjangkau masyarakat kecil di desa. Berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, *Labda Pacingkreman* Desa Adat selanjutnya disebut sebagai LPD berkedudukan di wilayah desa adat dan memiliki batas tertentu atau disebut *wewidangan* desa adat.

Penciri yang menjadikan LPD berbeda dengan lembaga keuangan lain adalah kepemilikan yang sepenuhnya dimiliki desa adat atau desa *pakraman* (masyarakat yang tercatat sebagai anggota di desa adat setempat) dan modalnya berasal dari swadaya masyarakat sendiri atau turunan *krama* desa (Dewi & Sujana, 2021). Tercatat sejak tahun 2022 hingga 2024 jumlah desa adat di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan yakni sejumlah 1.500 Desa Adat akibat dari adanya pemekaran desa adat khususnya seperti yang ada di Kabupaten Bangli tepatnya penambahan Desa Adat Siladan Kaler dan juga Desa Adat Tegal Suci. Kendati pertumbuhan desa adat meningkat, nyatanya jumlah tersebut tidak diiringi dengan peningkatan jumlah LPD di Bali. Menurut Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali, tercatat jumlah LPD di Bali per Desember 2024 adalah 1.439 unit. Rincian LPD yang tercatat di Kabupaten Badung adalah 122 LPD, di Kabupaten Bangli tercatat 159 LPD, di Kabupaten Buleleng tercatat 169 LPD, di Kota Denpasar tercatat 35 LPD, di Kabupaten Gianyar tercatat 270 LPD, di Kabupaten Jembrana tercatat 64 LPD, di Kabupaten Karangasem tercatat 190 LPD, di Kabupaten Klungkung tercatat 119 LPD, dan terakhir Kabupaten Tabanan tercatat 311 LPD. Disisi lain, hal ini menunjukkan bahwa LPD telah tersebar di hampir seluruh bagian desa adat di Provinsi Bali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, tentu peran LPD tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan seperti menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan deposito, dan penyaluran kredit kepada penduduk desa. Tidak hanya itu, penilaian kesehatan LPD menjadi sangat penting dilakukan, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD khususnya pasal 23 ayat 2, terdapat lima aspek dalam penilaian kesehatan LPD seperti kecukupan modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, laba dan likuiditas (CAMEL).

Merujuk pada data yang diterbitkan oleh LPLPD Provinsi Bali tahun 2025, diperoleh garis besar informasi bahwa mayoritas LPD di Bali telah terklasifikasi sehat sebanyak 728 LPD, namun masih ditemukan adanya LPD yang tergolong kurang sehat dan bahkan tidak beroperasi dengan jumlah yang cukup tinggi di tiap kabupaten di Bali sejak tahun 2022 hingga 2024 sekitar 711 LPD. Patokan tingkat kesehatan LPD tidak hanya pada klasifikasi tersebut, melainkan juga capaian kinerja keuangan. Laporan laba rugi yang tercatat setiap tahunnya menjadi tolok ukur kebermanfaatan ekonomi berkelanjutan yang dirasakan masyarakat. Suparsa et al., (2024) menjelaskan bahwa kinerja LPD dinilai berdasarkan pada keseluruhan aspek keuangan dan non-keuangan yang menunjukkan posisinya sebagai lembaga yang sehat. Selanjutnya, pada periode 2022-2024 terdapat tren positif dimana capaian laba tahun berjalan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (LPLPD Provinsi, 2025). Hal ini mengindikasikan LPD di Bali mampu menjaga pertumbuhan keuangan yang sehat dengan kontributor utama adalah Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar. Walau kabupaten tersebut tercatat menjadi kontributor, namun masih ditemukan kerugian besar dari tahun ke tahun. Tercatatnya laba positif pada LPD harus tetap memperhatikan efisiensi, manajemen risiko dan pengawasan internal agar sisa kerugian akumulatif dapat ditekan sehingga kinerja keuangan dapat lebih merata dan berkelanjutan. Rentetan permasalahan yang dihadapi oleh LPD di Provinsi Bali adalah mulai dari adanya modus kredit fiktif, penggelapan dana LPD, manipulasi LPD, tidak efektifnya pengawasan internal, penggelapan dana nasabah, pemindahan dana LPD ke desa lain tanpa sepengetahuan dewan pengawas, realisasi kredit diluar desa tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, dan bahkan pinjaman dengan jaminan fiktif oleh pengurus LPD.

Peristiwa tersebut menjadi sebuah penanda bahwa restrukturisasi moral sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan LPD yang transparan dan akuntabel. *Tri Hita Karana* (THK) adalah sebuah konsep lokal yang diusung sebagai bentuk komitmen menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini sangat relevan untuk diadopsi ke dalam operasional LPD. THK terdiri dari *Parhyangan* (hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan harmonis sesama manusia), dan *Palemahan* (hubungan harmonis manusia dengan alam). Implementasi THK sebagai sebuah budaya organisasi dalam operasional LPD diyakini mampu menjaga keseimbangan modernisasi dengan pelestarian nilai tradisional. Internalisasi nilai luhur THK dapat menjadi pijakan integritas sosial dan nilai budaya dalam pelaksanaan operasional LPD. Joseph & Kibera, (2019) menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki kaitan yang erat dengan kinerja melalui pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku karyawan. Artinya bahwa, relevansi nilai budaya lokal dalam pengelolaan lembaga keuangan dapat memantik partisipasi dari masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ada. Hal ini pula menjadi sebuah bukti bahwa THK selaras dengan fungsi LPD dalam menghasilkan keuntungan dan juga menjaga kohesi sosial dalam komunitas adat.

Selanjutnya, dalam konteks kehidupan adat di Bali, *awig-awig* menjadi elemen penting pelindung keberlanjutan LPD. *Awig-awig* menjadi proteksi hukum adat yang memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap operasional LPD serta memperkuat kedudukan lembaga ini di tengah masyarakat. Regulasi adat ini menjadi pencegah adanya gesekan internal dan meningkatkan rasa memiliki serta kepercayaan masyarakat terhadap LPD. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Suwitra dkk, (2020) bahkan penegakan *awig-awig* menjadi hukum yang tegas dalam

menjaga stabilitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat, dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi adat atau *kasepekan*. Urgensi penerapan regulasi ini dalam LPD adalah dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi ekonomi dan pelestarian budaya. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki rasa aman karena LPD beroperasi dalam naungan kaidah yang semestinya karena adanya unsur hukum adat yang mengikat.

Penelitian ini relevan dengan sudut pandang teori agensi yang memberikan sebuah pemahaman tentang adanya potensi konflik kepentingan antara pengelola lpd selaku agen dan juga masyarakat selaku prinsipal. Lemahnya pengawasan internal dan degradasi nilai moral menjadi sebuah ancaman dari keberlanjutan LPD. Melalui kerangka THK sebagai bingkai budaya organisasi dan *awig-awig*, diyakini bahwa keduanya mampu mempertahankan keseimbangan dan harmonisasi modernisasi dengan nilai tradisional.

2. Metode

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berbasis hubungan atau asosiatif. Penelitian ini melibatkan pengukuran variabel yang diukur melalui penyebaran kuesioner kepada LPD yang terdaftar di LPLPD. Berlokasi di Bali, dengan unit LPD yang menjadi populasi adalah 1.439 unit dan akan dikerucutkan dengan pemilihan sampling yakni *non probability sampling* khususnya metode *purposive sampling* dengan kriteria bahwa LPD yang terlibat adalah LPD aktif, tergolong sehat, dan menggunakan LPD Mobile. Selanjutnya, responden dari LPD adalah *Pamucuk* (Kepala LPD) dengan pertimbangan bahwa perannya sangat vital dalam operasional dan bertanggungjawab atas kinerja LPD.

Variabel yang digunakan mencakup kinerja keuangan LPD yang akan diukur dengan pertanyaan/pernyataan kuesioner yang berkaitan dengan aspek keuangan seperti ROA, BOPO, CAR, NPL, ROE, dan LDR merujuk pada penelitian oleh Susila, (2017). Variabel Nilai THK akan diukur melalui refleksi tiga nilai menurut Dewi & Sujana, (2021) dalam THK dalam kuesioner, dan variabel *awig-awig* akan diukur dengan pernyataan atau pertanyaan tentang pedoman bertingkah laku, sanksi tegas, rasa aman dan prosedur pengelolaan dengan merujuk pada penelitian Dewi & Sujana, (2021). Setiap kuesioner akan menggunakan skala pengukuran *Likert* 5 point. Selanjutnya kuesioner akan disebarkan secara *hybrid* yakni dengan menggunakan *hard copy* dan menggunakan *google form*. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat memberikan hasil yang sesuai, telah dilakukan serangkaian pilot test terhadap instrumen, dan selanjutnya barulah kuesioner disebarkan. Serangkaian analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa SEM-PLS yang mencakup evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural dan juga pembuktian hipotesis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Analisis Deskriptif

Kuesioner yang telah didistribusikan kepada *Pamucuk* (Kepala LPD) dan pengurus LPD di Provinsi Bali sebanyak 96 LPD yang tersebar di berbagai kabupaten dan Kota, dan setiap LPD akan diwakili oleh 2 orang partisipan yakni *Pamucuk* dan pengurus LPD, sehingga secara total partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 192 orang. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan 192 jawaban tersebut kurang lebih selama 1 bulan. Realitas yang ditemukan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dimana jumlah

kuesioner fisik dan *google form*, hanya diperoleh 174 jawaban. Adapun rincian jumlah kuesioner yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Kuesioner yang Dapat digunakan

Kuesioner yang didistribusikan	96
Kuesioner yang diisi secara langsung	65
Kuesioner yang diisi melalui Form	22
Kuesioner yang tidak kembali	(9)
Total Respon yang dapat digunakan	174

Sumber : Data primer, (2026)

Dengan berlandaskan pada acuan awal jumlah respon yang diterima adalah 192 jawaban (100%) dan secara realitas hanya ada 174 jawaban yang dapat digunakan atau sekitar 90,6%, hasil ini masih dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan karena berdasarkan *central limit theorem* menyatakan bahwa minimal sampel untuk mencari kurva normal setidaknya mencapai nilai 30 orang responden (Sugiyono, 2017:129). Deskripsi data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 bagian yakni berkaitan dengan demografi partisipan dan juga deskripsi tentang frekuensi jawaban yang telah diberikan oleh responden. Profil partisipan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir. Adapun profilnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Profil Partisipan

No	Karakteristik Responden	Jumlah	
		Orang	Persentase
Berdasarkan Usia			
1	< 30 Tahun	18	10,34%
2	31 – 40 Tahun	67	38,51%
3	41 – 50 Tahun	73	41,95%
4	>50 Tahun	16	9,20%
Jumlah		174	100%
Berdasarkan Jenis Kelamin			
1	Laki-Laki	128	73,56%
2	Perempuan	46	26,44%
Jumlah		174	100%
Berdasarkan Pendidikan Terakhir			
1	SMP	2	1,15%
2	SMA	39	22,41%
3	Diploma	57	32,76%
4	S1	70	40,23%
5	S2	6	3,45%
Jumlah		174	100%

Sumber: Data Primer diolah, (2026)

Data yang telah disajikan di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang merupakan *Pamucuk LPD* di Bali adalah Laki-Laki dengan usia 41-50 tahun dan paling tidak telah menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1. Selanjutnya adalah dekripsi tentang variabel yang sudah ditanggapi oleh responden diperoleh informasi bahwa :

Penerapan *Awig-Awig* diukur dengan menggunakan 4 indikator dan terefleksikan dengan 4 pernyataan memperoleh skor 4,06 dan dikelompokkan dalam kategori Baik. Maknanya adalah penerapan awig-awig pada operasional LPD di Provinsi Bali telah terlaksana dengan Baik. Hasil ini didukung melalui pernyataan dengan perolehan tertinggi diantara pernyataan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan *awig-awig* sebagai pedoman dalam bertindak laku di dalam suatu organisasi.

Tri Hita Karana merupakan variabel eksogen lainnya dalam penelitian ini dan berdasarkan pada penilaian yang diberikan oleh responden, penerapan nilai *Tri Hita Karana* dalam menjalankan operasional LPD telah terefleksikan dengan baik yang tercermin dengan perolehan skor yakni 4,19 dan diperkuat dengan pernyataan melalui pernyataan yang memperoleh rerata tertinggi dibandingkan dengan pernyataan lainnya yang berkaitan dengan keyakinan bahwa THK dapat mendukung keberlangsungan usaha.

Kinerja keuangan merupakan variabel endogen satu-satunya dalam penelitian ini dengan perolehan nilai 3,87 dan tergolong tinggi. Maknanya bahwa kinerja keuangan yang dihasilkan oleh LPD di Provinsi Bali tergolong tinggi, hal ini didukung pula melalui penilaian responden bahwa pengelolaan rasio CAR yang terkendali, serta kebijakan dalam menyediakan kas minimum yang tidak akan mengganggu penyaluran pinjaman.

3.2 Uji Statistik

3.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran outer model dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya serta *composite reliability* untuk keseluruhan indikatornya. Hasil pengujian *convergent validity* menunjukkan bahwa seluruh nilai *outer loading* indikator variabel memiliki nilai **lebih besar dari 0,50**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **seluruh indikator telah memenuhi persyaratan *convergent validity***.

Tabel 2
Nilai *Outer Loading*

	AWIG	KIN	THK
AWG1	0,931		
AWG2	0,937		
AWG3	0,913		
AWG4	0,870		
KIN1		0,780	
KIN10		0,785	
KIN11		0,785	
KIN12		0,827	
KIN13		0,819	
KIN14		0,819	

KIN2		0,809	
KIN3		0,802	
KIN4		0,821	
KIN5		0,822	
KIN6		0,786	
KIN7		0,847	
KIN8		0,829	
KIN9		0,791	
THK1			0,683
THK2			0,721
THK3			0,763
THK4			0,707
THK5			0,716
THK6			0,715

Sumber : Data Penelitian, (2026)

Hair et al., (2019) menyatakan bahwa sebagai suatu alternatif yang baik guna mengukur validitas diskriminan adalah dengan menggunakan rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT). HTMT yang ideal adalah yang nilai korelasinya sekecil mungkin, disarankan untuk menggunakan ambang batas yang lebih konservatif, seperti 0,85 (Henseler et al., 2015). Berdasarkan pengujian dapat dilihat bahwa nilai HTMT memiliki **nilai korelasi dibawah 0,85** sehingga **validitas diskriminan terpenuhi**.

Tabel 3
Nilai Heterotrait-Monotrait

	AWIG	KIN
AWIG		
KIN	0,712	
THK	0,653	0,832

Sumber : Data Penelitian, (2026)

Composite reliability digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk dan lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika mempunyai *composite reliability* di atas 0,70 dan mempunyai *cronbach alpha* di atas 0,60. Hasil *output composite reliability* setiap variabel semuanya **diatas 0,70**. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa **seluruh variabel memiliki reliabilitas yang baik**.

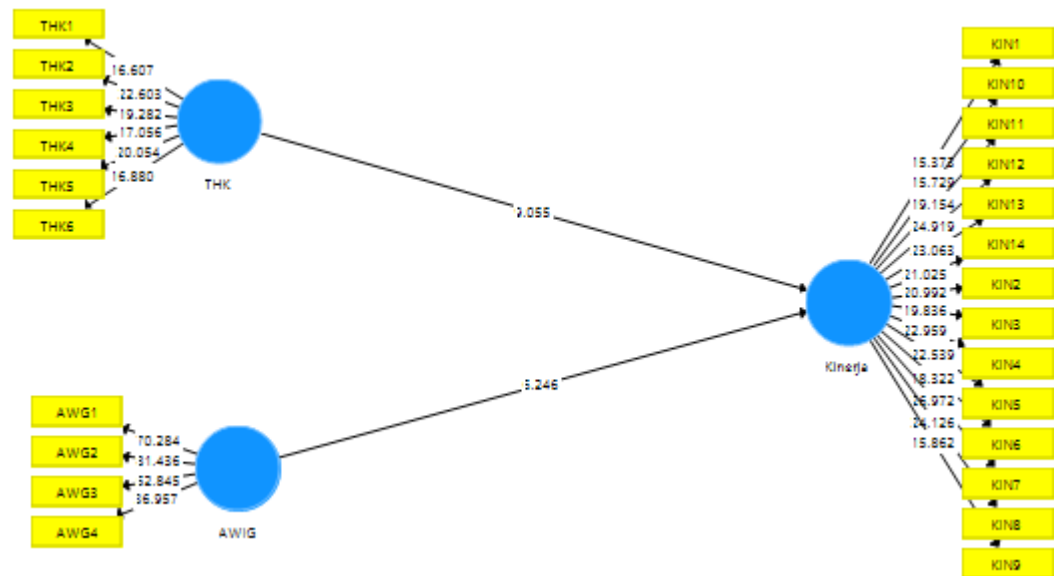
Tabel 4
Nilai Composite Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
AWIG	0,933	0,953
KIN	0,959	0,964
THK	0,812	0,865

Sumber : Data Penelitian, (2026)

Gambar 1 berikut ini adalah hasil evaluasi model struktural yang digunakan

dalam penelitian ini.



Gambar 1.
Model Struktural Penelitian

3.2.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian inner model dilakukan dengan melihat nilai *R-square* yang merupakan uji *goodness of fit model*. Dapat dijelaskan bahwa nilai *R Square* untuk variabel kinerja keuangan LPD adalah sebesar 0,642 yang artinya adalah model penelitian ini adalah moderat atau 64,2% variasi kinerja keuangan LPD di Provinsi Bali dipengaruhi oleh *tri hita karana*, dan penerapan *awig-awig* dan sisanya adalah variasi lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 5
Nilai Koefisien Determinasi

	<i>R Square</i>
Kinerja Keuangan	0,642

Sumber : Data Penelitian, (2026)

3.2.3 Pengujian Hipotesis (*Bootstrapping*)

Prosedur *bootstrapping* menghasilkan nilai t-statistik untuk setiap jalur hubungan yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai t-statistik yang diperoleh selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t-tabel, dan untuk penelitian yang menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan yang diterima yakni $\alpha = 5\%$ memiliki nilai t-tabel 1,96. Apabila nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel (t-statistik < 1,96) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan apabila nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (t-statistik > 1,96) maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 6
Nilai Koefisien Determinasi

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
AWIG -> Kinerja	0,38	0,38	0,06	6,25	0,00
THK -> Kinerja	0,52	0,52	0,06	9,06	0,00

Sumber : Data Penelitian, (2026)

Nilai *p-value* untuk menguji pengaruh nilai THK terhadap kinerja keuangan LPD adalah sebesar 0,000 yang nilainya lebih rendah dari 0,05. Nilai koefisien bernilai 0,52 yang dapat diartikan bahwa hipotesis 1 (H_1) diterima dan H_0 ditolak.

Nilai *p-value* untuk menguji pengaruh penerapan *awig-awig* terhadap kinerja keuangan LPD adalah sebesar 0,000 yang nilainya lebih rendah dari 0,05. Nilai koefisien bernilai 0,38 yang dapat diartikan bahwa hipotesis 2 (H_2) diterima dan H_0 ditolak.

3.5 Pembahasan

Tri Hita Karana ialah sebuah asumsi dasar, perilaku, sikap bersama dan nilai yang berlandaskan pada filosofi THK, dianut dan diilhami oleh masyarakat dalam konteks pengurus LPD dalam memahami lingkungan organisasinya untuk mencapai tujuan. Melalui THK, pengelola LPD memiliki pemahaman akan pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai *agen* untuk menciptakan kemakmuran *krama desa adat*. Dengan berlandaskan keyakinan bahwa apa yang diperbuat akan kembali padanya, maka pengelola akan senantiasa mengupayakan yang terbaik bagi *krama desa*, seperti menciptakan kinerja keuangan yang optimal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa THK adalah sebuah budaya organisasi yang mencerminkan upaya organisasi dalam menjunjung kesejahteraan bersama dalam lingkup LPD. LPD memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lembaga keuangan lainnya karena keberadaannya sangat terkait dengan adat, budaya, dan kehidupan keagamaan masyarakat Bali. Keterkaitan tersebut menjadikan nilai-nilai Tri Hita Karana (THK) tidak hanya sebagai pedoman budaya, tetapi juga sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan, keseimbangan, dan keharmonisan kehidupan. Dalam konteks organisasi, nilai-nilai tersebut dapat membentuk pola perilaku dan cara kerja yang mendukung pencapaian tujuan lembaga. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Martínez-Caro et al., (2020) yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang selaras dengan strategi digital maupun perubahan sistem mampu mendukung proses implementasi teknologi serta meningkatkan kinerja organisasi. Dengan kata lain, budaya organisasi yang kuat dan sesuai dengan arah pengembangan lembaga dapat mempermudah penerapan sistem baru dan mendorong tercapainya target kinerja yang diharapkan.

Penerapan *awig-awig* adalah proses mengimplementasikan aturan atau norma adat yang disepakati oleh masyarakat desa adat (*krama desa*) sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun tata kelola

kelembagaan, termasuk dalam operasional LPD. Melalui penerapan ini, awig-awig berfungsi sebagai mekanisme pengendali, pengikat, dan pengarah perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai, etika, dan kesepakatan bersama. Dalam LPD, awig-awig berperan sebagai pedoman yang mengatur hak, kewajiban, serta perilaku pengelola dan para pihak yang berkepentingan dalam menjalankan kegiatan lembaga. Keberadaan awig-awig juga menjadi dasar dalam mencegah dan menyelesaikan potensi konflik kepentingan sehingga tata kelola organisasi dapat berjalan dengan lebih tertib dan akuntabel (Diatmika & Ramantha, 2021). Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Diatmika & Ramantha, (2021) yang menunjukkan bahwa awig-awig memberikan kontribusi positif terhadap kinerja LPD. Pengaruh tersebut tercermin melalui penguatan sistem pengendalian internal serta berkurangnya risiko konflik kepentingan dalam pengelolaan lembaga. Dengan adanya aturan yang disepakati dan dipatuhi bersama, kegiatan operasional LPD dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai lokal yang berlaku serta prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan layanan kepada masyarakat.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Tri Hita Karana dan penerapan awig-awig merupakan faktor yang berperan dalam mendukung kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali. Sebagai lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan desa adat, LPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya karena pengelolaannya tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan aturan adat yang berlaku di masyarakat. Nilai Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan memberikan landasan bagi terbentuknya budaya organisasi yang mendukung terciptanya kepercayaan, kerja sama, dan tanggung jawab dalam pengelolaan lembaga. Di sisi lain, awig-awig berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku dan tata kelola lembaga sehingga dapat memperkuat pengendalian internal serta menjaga kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan operasional LPD. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan LPD tidak hanya ditentukan oleh aspek keuangan dan manajerial, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan organisasi. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan memperkuat implementasi nilai Tri Hita Karana serta penerapan *awig-awig* perlu terus dilakukan agar LPD mampu mempertahankan kinerja keuangannya sekaligus menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi milik desa adat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini memberikan sebuah sudut pandang baru tentang pentingnya menjaga nilai lokal dalam menciptakan kesejahteraan bersama dalam lingkup masyarakat desa adat. Implementasi dan pengilhaman THK serta *awig-awig* akan menjadi semakin mengakar pada kebiasaan masyarakat tatkala disertai dengan adanya semangat *mebraya*, *karmaphala*, *tat twam asi*, *pararem*, dan lainnya. Selama proses penelitian ini berlangsung, ditemukan sebuah *gap* penelitian khususnya berkaitan dengan kesetaraan peran wanita dan laki-laki dalam memimpin LPD. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang memerlukan penelusuran mendalam tentang peran wanita dalam memimpin LPD dimana, dalam konteks ini peran wanita dalam masyarakat adat di Bali sangatlah kompleks. Akankah peran tersebut menjadi sebuah penghalang bagi wanita dalam menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pemimpin.

Daftar Pustaka

- Agustini, M. E. (2019). Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Desa Legian. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 279–291.
- Dewi, D. P. R., & Sujana, I. K. (2021). The Effect of Organizational Commitment , Organization Culture Based on Tri Hita Karana and Awig-Awig Protection on the Performance of Lembaga Perkreditan Desa in Bangli Regency. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 168–175.
- Diatmika, I. B. W., & Ramantha, I. W. (2021). The Effect of Good Corporate Governance on the Performance of Village Crediting Institutions (LPD) Using Awig-Awig Village Protection as Moderation Variables (Empirical Study on LPD in Mengwi District, Badung Regency). *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 219–224.
- Fajar, N. M. A. P. (2022). Pengaturan Kewenangan Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pekraman Desa Adat di Bali. *Yustitia*, 16(1), 45–53.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0. Ed. Ke-2*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Joseph, O. O., & Kibera, F. (2019). Organizational Culture and Performance : Evidence From Microfinance Institutions in Kenya. *SAGE Open*, 1–11. <https://doi.org/10.1177/2158244019835934>
- Kusumaputra, A. (2017). *Optimalisasi pembangunan ekonomi nasional melalui otonomi desa*. 22(1), 55–65.
- Martínez-Caro, E., Cegarra-Navarro, J. G., & Alfonso-Ruiz, F. J. (2020). Digital Technologies and Firm Performance: The Role of Digital Organisational Culture. *Technological Forecasting and Social Change*, 154, 1–28.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparsa, I. M., Werastuti, D. N. S., & Diatmika, I. P. G. (2024). Catur Purusa Artha Memoderasi Pengaruh Good Corporate Governance dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja LPD. *Juara : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 174–193.
- Susila, G. P. A. J. (2017). Pengukuran Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Susut Dengan Analisis Balanced Scorecard. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 810.
- Suwitra, I. M., Selamat, I. K., & Datrini, L. K. (2020). Jurnal Hukum & Pembangunan Penguatan Kapasitas LPD Desa Adat Di Bali Melalui Penyuratan Awig-Awig. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 666–688. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2585>